BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Reformasi pada tahun 1998 mengawali lengsernya kepemimpinan Orde Baru. Reformasi memberikan kelonggaran bagi sistem pemerintahan yang lepas kontrol. Pemisahan kekuasaan menciptakan penguasa-penguasa lokal disetiap daerah melalui desentralisasi dan otonomi daerah. Kebutuhan masyarakat akan pelayanan saat ini semakin meningkat, hal tersebut mendorong Institusi pemerintah sebagai pelayan masyarakat untuk menemukan dan memahami cara yang profesional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, salah satunya adalah peningkatan kualitas pelayanan dibidang pertanahan.

Tanah mempunyai arti penting bagi kehidupan manusia karena tanah memberikan kehidupan yang begitu besar bagi manusia. Aktivitas manusia sehari-hari tidak dapat lepas dari fungsi dan manfaat tanah yang dapat kita rasakan sekarang ini, dimana tanah yang diatasnya didirikan bangunan untuk tempat tinggal kita. Masalah pertanahan merupakan masalah utama yang harus dihadapi karena manusia tidak dapat dipisahkan dengan tanah, salah satunya adalah bukti kepemilikan atas tanah, hal tersebut dikarenakan tanah merupakan harta yang sangat berharga yang dapat menjadi permasalah atau pertikaian dikemudian hari apabila tidak mempunyai bukti kuat atas tanah yang kita miliki. Masalah pertanahan adalah masalah pertambahan penduduk dimana setiap tahun jumlah

penduduk selalu bertambah. Setiap manusia yang hidup ingin mempunyai tanah sendiri sedangkan jumlah tanah yang ada tidak akan bertambah atau tetap.

Pelayanan sertifikasi tanah awalnya dilaksanakan secara manual dan pengukuran bidang tanah masih menggunakan tangan sebagai ukuran (depa), serta penulisan sertifikasi masih menggunakan tangan dan diketik menggunakan mesin tik. Proses inilah yang memakan waktu cukup lama, sehingga proses pembuatan sertifikasi tanah sering kali lamban dan tidak efisien, oleh karena itu pemerintah membuat kebijakan untuk mempermudah serta mempercepat dalam proses pembuatan akta tanah.

Banyaknya permasalahan pertanahan baik dalam proses penyediaannya, terlebih dalam hubungannya dengan status penggunaan tanah dengan berbagai perubahannya, maka akan berakibat pula pada semakin kompleksnya permasalahan dalam proses pelayanan dibidang pertanahan. Pemasalahan yang disebabkan oleh semakin meningkatnya permintaan pelayanan dan dilain pihak aparat pertanahan juga dituntut untuk dapat memberikan pelayanan secara cepat, benar, murah, tepat waktu, memuaskan dan menjamin kepastian hukum.

Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat agar mendaftarkan tanahnya sebagai alat pembuktian yang kuat. Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah. Pendaftaran tanah itu diwajibkan bagi pemegang hak atas tanahnya jika tidak didaftarkan sewaktu-waktu dapat digugat oleh orang yang merasa lebih berhak atas tanah tersebut. Pembenahan pelayanan birokrasi yang selama ini cenderung dicitrakan jelek terus

menjadi masalah baik ditingkat publik maupun dilingkungan pemerintahan itu sendiri. Tuntutan akan perbaikan pelayanan publik mendorong Pemerintah agar konsisten untuk melaksanakan reformasi birokrasi dengan memberikan pelayanan prima kepada publik. Sedangkan ditingkat pemerintahan sendiri, harus diakui pula bahwa secara legal formal pembenahan pelayanan publik terus mendapat perhatian khusus.

Perkembangan zaman telah membawa perubahan dalam proses pelayanan pertanahan. Selaras dengan berjalannya waktu dan memasuki *era* teknologi informasi, maka Badan Pertanahan Nasional telah berkembang dengan sangat pesat, yaitu meningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi yang sangat canggih.

Pelayanan pertanahan telah dilakukan melalui berbagai kegiatan menggunakan komputer, mulai dari informasi sampai pada hasil produk akhir berupa surat keputusan ataupun sertifikat hak atas tanah. Dikeluarkannya tertib Perpres No. 10 Tahun 2006 tanggal 11 April 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional. Implementisinya dari Perpres No. 10 Tahun 2006 tanggal 11 April juga telah diterbitkan SK KBPN No. 3 dan N0. 4 tentang organisasi dan tata kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan Tata Kerja kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan, dimana Struktur Badan Pertanahan Nasional berkembang, sehingga Struktur Organisasi Badan Pertanahan Nasional di Tingkat Pusat, Kantor wilayah dan Kantor pertanahan agak berbeda dengan sebelumnya, salah satunya adalah adanya Struktur Pusat Data dan Informasi pertahanan yang dipimpin oleh eselon II. Pembentukan struktur baru ini bertujuan untuk

memfokuskan pemanfaatan teknologi sistem data base dibidang pertanahan. Khususnya dalam pengembangan Sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan.

Kegiatan Sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan merupakan kegiatan sistem komputerisasi terpadu dijajaran Badan Pertanahan Republik Indonesia dalam rangka meningkatkan standarisasi pelayanan pertanahan. Tujuan Sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan adalah untuk menjamin penggunaan informasi pertanahan bagi para *stakeholder* (aparatur) Kantor Pertanahan Kota Bandung, monitoring pelayanan, dan mencetak semua laporan Daftar Isian (DI).

Bentuk aplikasi data pelaporan dan penyebaran informasi untuk kepentingan internal maupun eksternal dimasukan ke dalam komputer secara bertahap dan data tersebut masuk ke dalam pengolahan data Sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan untuk diolah. Dukungan teknologi informasi di Kantor Pertanahan Kota Bandung menjadi sangat penting untuk memberikan pelayanan secara cepat dan aman dalam proses pembuatan, pengukuran, pengurusan, pendaftaran dan lainnya guna pembuatan sertifikasi tanah yang bersangkutan dengan masalah pertanahan.

Prinsip-prinsip yang memberikan dukungan tersebut, melalui rancang bangun, alur data dan proses akhir pada rancangan infrastruktur kemudian dibuat dan dikembangkanlah Sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan. Sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan dalam implementasinya terdiri dari adanya komponen yang berupa aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan dengan menggunakan sistem komputer yang memberikan berbagai informasi pertanahan khususnya tentang pembuatan sertifikasi tanah.

Komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: aplikasi Sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan dibangun dalam rangka pelayanan tentang segala urusan yang menyangkut pertanahan diantaranya, bidang pengaturan penguasaan tanah, penatagunaan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah guna pembuatan sertifikasi tanah.

Berkaitan dengan hal tersebut penelitian ini difokuskan pada permasalahan-permasalahan mengenai kualitas pelayanan sertifikasi tanah yang dirasakan oleh masyarakat dalam pembuatan sertifikasi tanah, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul "**Pengaruh Implementasi Kebijakan Sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) Terhadap Kualitas Pelayanan Sertifikasi Tanah Di Kantor Pertanahan Kota Bandung.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka untuk memperjelas fokus masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini. Peneliti menyusun identifikasi masalah sebagai berikut: Seberapa besar pengaruh implementasi kebijakan Sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan terhadap kualitas pelayanan sertifikasi tanah di Kantor Pertanahan Kota Bandung ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Implementasi Kebijakan Sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan Terhadap Kualitas Pelayanan Sertifikasi Tanah di Kantor Pertanahan Kota Bandung.

Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh implementasi kebijakan Sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) terhadap Kualitas Pelayanan Sertifikasi Tanah di Kantor Pertanahan Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis, sebagai berikut.

1. Bagi kepentingan peneliti, hasil penelitian ini dapat berguna untuk menambah pengalaman, wawasan, pengetahuan dan memahami bagaimana tanggapan masyarakat mengenai implementasi kebijakan Sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan sehingga dapat memperoleh gambaran mengenai kesesuaian fakta dilapangan dengan teori yang ada.
2. Secara teoritis, hasil penelitian ini untuk mengembangkan teori-teori yang peneliti gunakan yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini dan dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan Ilmu Pemerintahan khususnya pengembangan *e-Government*.
3. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi peningkatan kualitas pelayanan sertifikasi tanah di Kantor Pertanahan Kota Bandung.

1.5 Kerangka Pemikiran

Kebijakan merupakan salah satu produk pemerintah dengan tujuan untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik sehingga suatu kebijakan harus benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat dan ditujukan untuk mensejahterakan kepentingan masyarakat. Implementasi kebijakan menurut Riant Nugroho dalam bukunya yang berjudul *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi* mendefinisikan sebagai berikut:

> "Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk programprogram atau melalaui formulasi kebijakan derivat atau dari kebijakan publik tersebut" (Nugroho, 2004:158-163).

Implementasi kebijakan menurut pendapat diatas, tidak lain berkaitan dengan cara agar kebijakan dapat mencapai tujuan. Proses tersebut diimplementasikan melalui bentuk program-program serta melalui formulasi dari kebijakan tersebut. Formulasi yang dimaksud adalah dengan ketetapan atau aturan yang berlaku sesuai perundang-undangan. Pengertian Implementasi kebijakan diatas, secara rinci menurut Riant Nugroho didalam implementasi kebijakan dapat disusun berurutan sebagai berikut:

1. Implementasi Strategi (praimplementasi)
2. Pengorganisasian (*organizing*)
3. Penggerakan dan Kepemimpinan
4. Pengendalian.

(Nugroho, 2004:158-163)

Berdasarkan definisi diatas, implementasi kebijakan yaitu perlu adanya tahap-tahap praimplementasi dapat dimaksudkan sebelum adanya keputusan kebijakan; *organizing* dapat dimaksudkan dalam tahap implementasi perlu adanya

organisasi; penggerakan dan kepemimpinan dapat dimaksudkan dalam tahap pembuatan keputusan dalam sebuah organisasi perlu adanya ketua atau pemimpin, dan pengendalian dimaksudkan sebagai pengambilan keputusan program atau kebijakan. Tujuan dari program ini agar kebijakan implementasi dapat tepat guna.

Melengkapi teori tentang Sistem menurut Hartono, Sistem berasal dari bahasa Latin (*systēma*) dan bahasa Yunani (*sustēma*) adalah :

> "Suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi. Terdapat dua kelompok pendekatan di dalam mendefinisikan sistem, yaitu menekankan pada prosedurnya dan menekankan pada komponen atau elemennya." (Hartono, 2001:1-2)

Berdasarkan pengertian diatas, maka sistem tersebut merupakan suatu kumpulan atau grup dari subsistem/bagian/komponen apa pun baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lainnya dan bekerja secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pendapat lain tentang sistem yang dikemukakan oleh Abdul Kadir dalam bukunya yang berjudul *Pengenalan Sistem Informasi*, yaitu : "Sistem adalah sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan" (Kadir,2003:54).

Berdasarkan definisi diatas, maka sistem tersebut merupakan suatu kumpulan yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya dan melakukan suatu kerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang akan dicapainya. Jika komponen-komponen tersebut yang membentuk sistem tidak saling berhubungan dan tidak bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan maka komponen tersebut atau kumpulan tersebut bukanlah sistem. Sistem sangat diperlukan untuk menentukan dan mencapai suatu tujuan tertentu.

Istilah komputer mempunyai arti yang luas dan berbeda untuk orang yang berbeda. Istilah komputer (*computer*) diambil dari bahasa latin *computare* yang berarti menghitung (*to compute reckon*). Pengertian komputer menurut Robert H. Blissmer dalam buku *Computer Annual* adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas sebagai berikut:

1) Menerima input
2) Memproses input tadi sesuai dengan programnya
3) Menyimpan perintah-perintah dan hasil dari pengolahan
4) Menyediakan output dalam bentuk informasi
(Dalam Hartono,2004:01).

Pengertian komputer yang diuraikan oleh Robert H memiliki tugas-tugas, diantaranya : Menerima input, memproses, menyimpan dan menyediakan. Berdasarkan definisi diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa komputer adalah seperangkat alat elektronik yang berfungsi menerima data kemudian diproses sesuai dengan kebutuhan. Pengertian sistem dan komputer diatas telah jelas, maka akan diuraikan tentang pengertian sistem komputer adalah mengolah data untuk menghasilkan informasi. Tujuan pokok tersebut dapat terlaksana, sehingga terdapat elemen-elemen yang mendukungnya. Elemen-elemen dari sistem komputer adalah *sofware, hardware*, dan *brainware* (Hartono, 2004:04).

Definisi diatas dapat diartikan bahwa sistem komputer merupakan seperangkat alat elektronik yang didalamnya berisikan komponen jaringan-jaringan, didukung oleh aplikasi berupa *sofware*, dan perangkat-perangkat pendukung berupa *hardware*, serta yang mengoperasikannya adalah *brainware* (manusia). Manusia merupakan komponen yang sangat penting dalam proses

memasukan data (*input*), pengolahan data, dan yang terakhir hasil dari olah data (*output*) yang dapat berupa produk dari Kantor Pertanahan Kota Bandung.

Kualitas merupakan sebuah kata yang bagi penyedia layanan merupakan sesuatu yang harus dikerjakan dengan baik. Aplikasi kualitas sebagai sifat dari penampilan produk atau kinerja merupakan bagian utama strategi perusahaan dalam rangka meraih keunggulan yang berkesinambungan. Kualitas dapat pula diartikan suatu cara menjaga janji pelayanan agar pihak yang dilayani merasa puas dan diuntungkan. Meningkatkan kualitas merupakan pekerjaan semua orang demi kebutuhan pelanggan. Tanggung jawab untuk kualitas produksi dan pengawasan kualitas tidak dapat didelegasikan kepada satu orang, misalnya staf pada sebuah perusahaan. Pelayanan publik yang diberikan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung melalui Sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan salah satunya adalah pelayanan terhadap sertifikasi tanah.

Tujuan dari pelayanan publik adalah untuk memuaskan pelanggan dalam hal ini adalah masyarakat. Meningkatan kualitas pelayanan publik yaitu dengan adanya kesetaraan hubungan antara masyarakat pengguna jasa dengan aparat yang bertugas memberikan jasa pelayanan sertifikasi tanah. Pelayanan publik hanya akan menjadi baik atau berkualitas apabila masyarakat yang mengurus sesuatu jenis pelayanan tertentu mempunyai posisi tawar yang sebanding dengan posisi tawar petugas pemberi pelayanan. Sinambela dalam bukunya yang berjudul *Reformasi Pelayanan Publik*, bahwa pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai berikut :

> “Pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara pemerintah serangkaian aktivitas yang

> dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat".(Sinambela, 2006:5).

Pelayanan publik menurut definisi diatas dikatakan bahwa pelayanan publik merupakan pemenuhan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hakikatnya Negara dalam hal ini adalah Pemerintah (birokrat) harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kualitas pelayanan berhubungan erat dengan pelayanan yang sistematis. Pelayanan yang berkualitas pada dasarnya bertujuan untuk memuaskan masyarakat. Sinambela dalam bukunya yang berjudul *Reformasi Pelayanan Publik* memberikan indikator kualitas pelayanan publik yaitu :

1. Transparansi,
2. Akuntabilitas,
3. Kondisional,
4. Partisipatif,
5. Kesamaan hak, dan
6. Keseimbangan hak dan kewajiban.

(Sinambela, 2006 : 6)

Masyarakat menuntut pada pemerintah untuk membuka akses seluas-luasnya terhadap praktik pelayanan publik melalui transparansi tersebut. Transparansi meliputi keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik, peraturan dan prosedur pelayanan yang dapat dipahami, dan kemudahan untuk memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik.

Akuntabilitas akan menunjukkan seberapa besar proses penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kepentingan *stakeholders* dan peraturan-peraturan yang

berlaku. Akuntabilitas dapat dilihat dari kinerja pelayanan publik, biaya pelayanan publik dan produk pelayanan publik. Kemampuan pemerintah dalam melayani masyarakat yang sesuai kondisi pemberi dan penerima pelayanan. Kemampuan pemerintah dalam menghadapi kendala-kendala yang terjadi dalam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Kondisional meliputi efisiensi dan efektivitas. Kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan kondisi dalam menyelenggarakan pelayanan yang dijanjikan secara akurat.

Partisipasi dalam pelayanan publik akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Kontribusi terhadap peningkatan kompetensi para pembuat keputusan melalui pengembangan pembuatan kebijakan yang berkualitas. Partisipasi dalam pelayanan publik dapat meningkatkan akuntabilitas publik serta mamberikan citra positif sebagai suatu masyarakat yang demokratis. Partisipasi dapat dilihat dari peran masyarakat, metode yang dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi, pencocokan instrumen partisipasi yang sesuai dengan peran masyarakat dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik, pemilihan instrumen partisipasi yang akan digunakan, dan mengimplementasikan strategi yang dipilih.

Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat atau konsumen diharapkan tidak dilakukan dengan diskriminatif. Pelayanan yang tidak membeda-bedakan suku, ras, golongan dan jabatan. Kesamaan hak dapat dilihat dari keteguhan dan ketegasan. Pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dengan tidak membeda-bedakan status sosial dan lainnya. Pelayanan yang adil dapat

menciptakan kepuasan masyarakat. Pelayanan yang adil akan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dapat menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban petugas dan penerima pelayanan. Keseimbangan hak dan kewajiban meliputi keadilan dan kejujuran.

Tertib Perpres No. 10 Tahun 2006 tanggal 11 April 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.

> "Implementisinya dari Perpres No. 10 Tahun 2006 tanggal 11 April 2006 juga telah diterbitkan SK KBPN No. 3 dan N0. 4 tentang organisasi dan tata kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan Tata Kerja kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan, dimana Struktur Badan Pertanahan Nasional berkembang, shingga Struktur Organisasi Badan Pertanahan Nasional di Tingkat Pusat, Kantor wilayah dan Kantor pertanahan agak berbeda dengan sebelumnya, salah satunya adalah Struktur adanya Struktur Pusat Data dan Informasi pertahanan yang dipimpin oleh eselon II. Pembentukan sruktur baru ini bertujuan untuk memfokuskan pemanfaatan teknologi sistem *database* di bidang pertanahan"

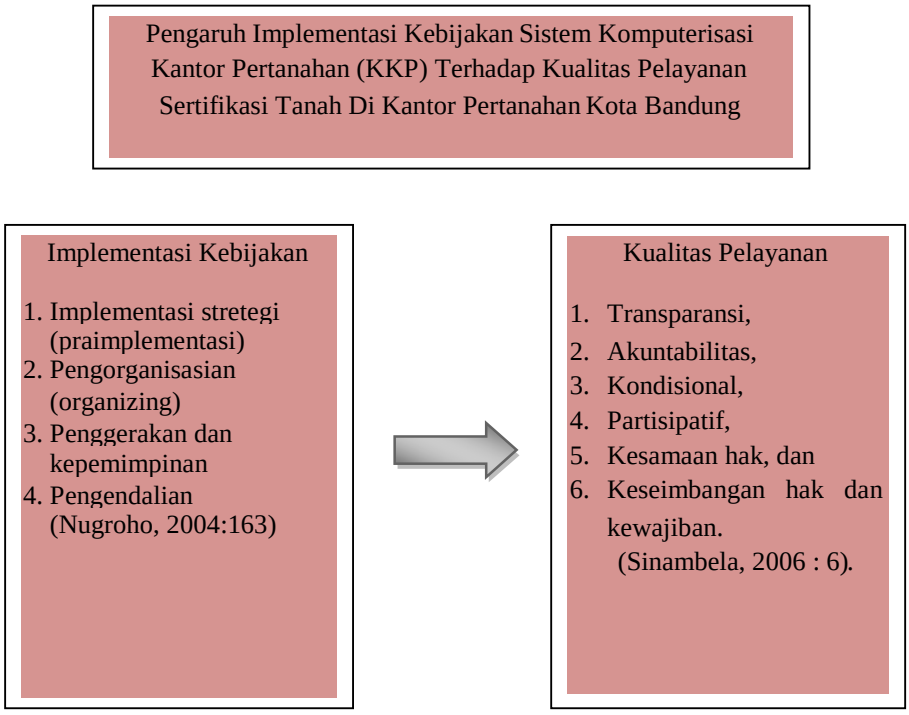
Menurut peraturan diatas, tujuan Sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan adalah untuk menjamin penggunaan informasi pertanahan bagi para *stakeholder*, baik publik maupun swasta. Pengolahan data yang difasilitasi dengan aplikasi layanan Sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan, pelaporan dan penyebaran informasi untuk kepentingan internal maupun eksternal bertujuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap publik khususnya tentang pembuatan sertifikasi tanah di Kota Bandung. Pengaruh yang menyebutkan Implementasi *e-Government* berpengaruh terhadap kualitas pelayanan secara implisit dikemukakan oleh Al Gore dan Tony Blair yaitu : Manfaat *e-Government* bagi suatu Negara, antara lain:

1) Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para *stakeholder*-nya (Masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efesiensi diberbagai bidang kehidupan bernegara;
2) Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep *Good Corporate Governance;*
3) Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah dan maupun *stakeholder*-nya untuk keperluan aktivitas sehari-hari;
4) Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan; dan
5) Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan *trend* yang ada; serta
6) Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan kebijakan publik secara merata dan demokratis

(Dalam Indrajit, 2004:5).

Teori tersebut secara tidak langgsung dapat mengambarkan adanya suatu hubungan atau pengaruh antara implementasi kebijakan baik positif atau negatif terhadap kualitas pelayanan sertifikasi tanah di Kantor Pertanahan Kota Bandung. Model kerangka pemikiran secara singkat dan jelas dapat kita lihat sebagai berikut:

Gambar 1.1
Model Kerangka Teori



Gambar model kerangka teori diatas, menunjukan pengaruh antara Variabel X yaitu Implementasi Kebijakan Sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan terhadap Variabel Y yaitu Kualitas Pelayanan Sertifikasi Tanah di Kantor Pertanahan Kota Bandung. Peneliti dalam penelitian ini terlebih dahulu membuat operasionalisasi variabel. Peneliti mengemukakan dua variabel yang terkait dalam penelitian ini adalah :

1. Variabel Independent (X)

   Variabel bebas yaitu “variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab berubahannya atau timbulnya variabel dependen”. Adapun yang menjadi variabel Independent (X) dalam penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan.

2. Variabel Dependen (Y)

"Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variable independen". Variabel dependen adalah kualitas pelayanan sertifikasi tanah.

Operasionalisasi variabel-variabel tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1 di berikut ini:

Tabel 1.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator
Variabel X : Implementasi Kebijakan Sistem Komputerisasi Kantor pertanahan	X1 : Implementasi Strategi (praimplementas)	a.Menyesuaikan struktur b.Mengoperasionalkan strategi c.Menggunakan prosedur
	X2 : Pengorganisasian (organizing)	a.Struktur organisasi b.Pembagian pekerjaan c.Hak
	X3: Penggerakan dan kepemimpinan	a.Efektivitas kepemimpinan b.Kerjasama tim c.Komunikasi organisasi
	X4 : Pengendalian	a.Sistem informasi b.Pengendalian anggaran c.Audit

Variabel	Dimensi	Indikator
Variabel Y Kualitas Pelayanan Sertifikas Tanah di Kantor Pertanahan Kota Bandung	Y_1 : Akuntabilitas	a. Kinerja b. Biaya c. Produk
	$Y_{2:}$ Transparansi	a. Keterbukaan proses penyelengaraan b. Peraturan dan prosedur Pelayanan c. Kemudahan memperoleh informasi
	Y_3 : Kondisional	a. Efisiensi b. Efektif
	$Y_{4:}$ Partisipatif	a. Peran masyarakat b. Identifikasi metode c. Implementasi strategi yang dipilih
	$Y_{5:}$ Kesamaan Hak	a. Keteguhan b. ketegasan
	$Y_{6:}$ Keseimbangan hak dan kewajiban	a. keadilan b. keterbukaan

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian ialah suatu teknik untuk mencari, memperoleh, mengumpulkan atau mencatat data, baik berupa data primer maupun data sekunder yang dapat digunakan untuk faktor-faktor yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang ada sehingga didapat suatu kebenaran atas data yang diperoleh. Metode penelitian menurut Silalahi diartikan sebagai “suatu penyelidikan yang sistematis dan metodis atas suatu masalah untuk menemukan

solusi atas masalah tersebut dan menambah khasanah pengetahuan" (Silalahi, 2006:2).

Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode penelitian deskriptif. Menurut Sanapiah Faisal dalam bukunya *Format-Format Penelitian Sosial*, menjelaskan bahwa penelitian deskriptif (*descriptive research*) adalah "Untuk eksplorasi dan klasifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti" (Faisal, 1999:20). Metode deskriptif merupakan metode yang bertujuan untuk mengetahui gambaran mengenai situasi atau kejadian yang ada untuk memperoleh data yang sesuai dengan masalah yang ada dengan tujuan penelitian.

Penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel X terhadap Y yang diteliti. Penelitian yang dilakukan dengan melihat imlpementasi kebijakan Sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan Sertifikasi dengan melakukan observasi, studi pustaka dan penyebaran angket pada masyarakat pengguna pelayanan sertifikasi tanah di Kota Bandung, sedangkan dalam proses pengumpulan data mempergunakan teknik *sample accidental*. Teknik *accidental* adalah mengambil responden sebagai sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data. (Black, 1999:264).

Berdasarkan metode yang peneliti gunakan, maka peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif menurut Silalahi diartikan sebagai :

> "Metode kuantitatif merupakan sebuah penyelidikan tentang masalah sosial berdasarkan pada pengujian sebuah teori yang terdiri dari variable-variabel, diukur dengan angka, dan dianalisis dengan prosedur statistik untuk menentukan apakah generalisasi prediktif teori tersebut benar" (Silalahi, 2006:69).

Pendekatan kuantitatif pada dasarnya digunakan untuk menguji suatu teori, mendeskripsikan statistik dan untuk menunjukan pengaruh antara dua variabel. Variabel tersebut adalah impementasi kebijakan Sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan sebagai variabel X dan kualitas pelayanan sertifikasi tanah di Kantor Pertanahan Kota Bandung sebagai variabel Y.

1.6.1 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara-cara untuk memperoleh data dan keterangan yang diperlukan dalam penelitian. Untuk menunjang penelitian, maka peneliti melakukan pengumpulan data-data sebagai berikut:

1. Observasi

   Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas yang dilakukan terhadap suatu proses dengan maksud mengetahui kegiatan yang sedang dilakukan. Proses penelitian ini, penulis melakukan pengamatan secara langsung di Kontor Pertanahan Kota Bandung untuk memperoleh data yang diperlukan guna kepentingan peneliti.

2. Angket

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menyebarkan angket yang berisi pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada para responden yang dalam hal ini adalah Masyarakat kota Bandung yang secara langgsung mendapatkan pelayanan dalam hal pembuatan sertifikat tanah. Angket dibuat dalam bentuk pertanyaan yang bersifat tertutup yang telah diberi skor dan setiap responden diminta untuk memilih salah satu alternatif jawaban yang telah ditentukan.

3. Studi pustaka

Yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari dan membaca untuk mendapatkan landasan teori atau pemikiran serta data-data empiris. Studi pustaka yang dilakukan oleh peneliti bersumber dari buku-buku, catatan-catatan yang ada hubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan atau proses pekerjaan mencatat atau merekam suatu peristiwa dan objek atau aktifitas yang dianggap berharga dan penting. Peneliti mengambil objek atau aktifitas masyarakat yang sedang mengajukan permohonan pelayanan sertifikasi tanah di Kantor Pertanahan Kota Bandung.

1.6.2 Teknik Penentuan Sampel

Menurut Ulber Silalahi pengertian populasi sebagai berikut “Populasi adalah jumlah total dari seluruh unit atau elemen dimana penyelidik tertarik” (Silalahi, 2006:223). Berdasarkan penjelasan tersebut, populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah tertentu yang membuat peneliti tertarik untuk menelitinya. Data yang menjadi pedoman penelitian ini adalah seluruh jumlah data yang sudah maupun masih dalam proses pembuatan sertifikasi tanah dari masyarakat di Kantor Pertanahan Kota Bandung.

“Sampel adalah suatu subjek atau tiap bagian dari populasi berdasarkan apakah itu reprensentatif atau tidak” (Silalahi, 2006:234). Teknik pengambilan sampel yang diambil oleh peneliti adalah teknik *sample accidental* yaitu pengambilan sampel secara kebetulan. Metode pengambilan ukuran sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah rumus *iterasi,* yaitu rumus pengambilan sampel berdasarkan sampel minimal, hal tersebut dikarenakan jumlah populasi dalam penelitian ini yang tidak terbatas atau akan terus bertambah. Adapun rumus tersebut ialah :

Perhitungan Sampel Iterasi

$$= \frac{1}{2} \quad \frac{1+}{1-}$$

$$= \frac{1}{2} \quad \frac{1+}{1-} \quad + \frac{}{2(\quad -1)}$$

$$= \frac{(\quad) + (\quad)}{(\quad)} + 3$$

Keterangan :
α = Alpa, kesalahan tipe I
β = Betha, kesalahan tipe II
ρ = Proporsi
X_1-X_2 = Effect size (Perbedaan Revata)
P_1-P_2 = Effect size (Perbedaan Proporsi)
(Sumber : Dahlan, 2005 : 15)

Jumlah populasi masyarakat pemohon pelayanan sertifikasi tanah yang ada Kantor Pertanahan Kota Bandung akan terus bertambah yang berlaku antara bulan Mei - Juli tahun 2011, dengan batas kesalahan sebesar 5% maka didapat jumlah sampel minimal sebagai berikut:

Keterangan:
$\rho = 0{,}54$ (nilai korelasi penelitian sebelumnya)
$\alpha = 0{,}05$
$1-\beta = 0{,}95$
$Z_{(1-\alpha)} = 1{,}96$
$Z_{(1-\beta)} = 1{,}645$

Perhitungan Iterasi 1

$$' = \frac{1}{2} \quad \frac{1 + 0{,}54}{1 - 0{,}54}$$

$$' = 0{,}6041$$

$$1 = \frac{(1{,}96 + 1{,}645)}{(0{,}641)} + 3$$

$$= \quad ,$$

Perhitungan Iterasi 2

$$' = \frac{1}{2} \quad \frac{1 + 0{,}54}{1 - 0{,}54} + \frac{0{,}54}{2(38{,}605 - 1)}$$

$$' = 0{,}6113$$

$$2 = \frac{(1{,}96 + 1{,}645)}{(0{,}6113)} + 3$$

$$= \quad ,$$

Perhitungan Iterasi 3

$$= \frac{1}{2} \quad \frac{1 + 0{,}54}{1 - 0{,}54} + \frac{0{,}54}{2(37{,}773 - 1)}$$

$$= 0{,}6114$$

$$2 = \frac{(1{,}96 + 1{,}645)}{(0{,}6114)} + 3$$

$$= \quad ,$$

Berdasarkan perhitungan diatas, maka angket akan dibagikan kepada masyarakat pemohon pelayanan sertifikasi tanah minimal sebanyak 37 orang responden. Pengambilan sampel minimal dilakukan karena penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei – Juli Tahun 2011, sehingga populasi pemohon sertifikasi tanah di Kota Bandung belum pasti (tetap).

1.6.3 Uji Validitas dan Reabilitas

Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk menguji kevaliditasan angket yang digunakan. Validitas menunjukkan sejauh mana relevansi pertanyaan terhadap apa yang ditanyakan atau apa yang ingin diukur dalam penelitian. Tingkat validitas kuesioner diukur berdasarkan koefisien validitas yang dalam hal ini menggunakan koefisien korelasi item-total yang terkoreksi. Menurut Kaplan suatu pertanyaan

dikatakan valid dan dapat mengukur variabel penelitian yang dimaksud jika nilai koefisien validitasnya lebih dari atau sama dengan 0,3.

> " *Not all validity coefficient are the same value, and there are no hard fast rule obout how large the coefficient must be in order to be meaningful. In practice, it is rare to see a validity coefficient larger than 0.6, and validity coefficient in the range of 0.3 to 0.4 are commonly considered high.*" (Robert M. Kaplan & Dennis P. Saccuzzo, Phsycological Testing principles, application, and issues; Brooks/Cole Publishing Company, Pacific Grove, California,1993 p: 141).

Berdasarkan pernyataan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa keputusan item validitas mengunakan kriteria Kaplan yaitu Item dinyatakan valid jika koefisien validitasnya lebih dari atau sama dengan 0.3. Uji Validitas dalam penelitian dijelaskan sebagai suatu derajat ketepatan alat ukur penelitian tentang isi atau arti sebenarnya yang diukur.

Pengujian validitas instrumen penelitian, peneliti menggunakan bantuan program komputer. Program komputer tersebut adalah *software SPSS* 13.0 *for Windows* dan *Microsoft Office Excel* 2007, untuk memberikan kemudahan dalam perhitungan.

Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana alat ukur dapat dipercaya dan diandalkan. Reliabilitas adalah suatu analisas yang menunjukan tingkat kemantapan dan ketepatan suatu alat ukur. Tujuan untuk mengetahui sejauh mana pengukuran dapat memberikan hasil yang konsisten, menunjukan tingkat ketepatan, keakuratan bila dilakukan dua kali atau lebih terhadap subjek dengan mengunakan alat ukur yang sama. Menurut Kaplan mendefinisikan Reliabilitas yaitu

> *"It has been sugested that reliability estimates in the range of 0,7 to 0,8 are good enough for most purposes in basic research"*. (Robert M. Kaplan & Dennis P. Saccuzzo, Phsycological Testing principles, application, and issues; Brooks/Cole Publishing Company, Pacific Grove, California, 1993 p 126)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa keputusan reliabilitas mengunakan kriteria Kaplan dinyatakan reliabilitas jika kelompok item dalam suatu dimensi koefisien relliabilitasnya tidak lebih rendah dari 0.7, dengan mengunakan rumus sebagai berikut :

$$\alpha = \left[\frac{k}{k-1}\right]\left[1 - \frac{\sum \sigma_b^{\,2}}{\sigma_1^{\,2}}\right]$$

Keterangan :
k = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal
$\sum\sigma_b^{\,2}$ = jumlah varians butir
$\sigma_1^{\,2}$ = varians total
(Kaplan

Sehubungan dengan tingkat pengukuran untuk variabel X implementasi kebijakan Sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan dan variabel Y kualitas pelayanan sertifikasi tanah di Kantor Pertanahan Kota Bandung. Tingkat pengukuran dari angket dalam penelitian ini menggunakan skala ordinal, maka agar dapat diolah data tersebut perlu diubah terlebih dahulu menjadi skala interval dengan menggunakan MSI *(Method Successive Interval)*. Proses mentransformasi skala ordinal menjadi skala interval tersebut merupakan teknik yang paling sederhana dalam mentransformasi skala ordinal menjadi skala interval. Proses pentransformasian data ordinal menjadi data interval dalam penelitian ini menggunakan bantuan program komputer yaitu *Microsoft Office Excel 2007 (Analize).*

1.6.4 Analisis Data

Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kuantitatif. Teknik pengumpulan data hasil kuesioner menggunakan skala *Likert* dimana alternantif jawaban nilai positif 5 sampai dengan 1. Pemberian skor dilakukan atas jawaban pertanyaan, baik dengan implementasi kebijakan Sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan (variabel X) maupun kualitas pelayanan sertifikasi tanah di Kantor Pertanahan Kota Bandung (variabel Y). Jawaban setiap item angket yang menggunakan skala *Likert* yang berupa data ordinal mempunyai gradasi sangat positif yang dapat berupa kata-kata sebagai berikut :

Tabel 1.2
Penentuan Skor Jawaban Angket

Jawaban Pertanyaan	Skor
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Ragu-ragu (RG)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber : Sugiyono, 2009:94

Proses menganalisis data, dalam analisis data peneliti menggunakan alat bantuan yaitu *software SPSS* 13.0 *for windows* untuk mempermudah perhitungan. *SPSS* (*Statistical Product and Service Solution*) adalah program aplikasi yang digunakan untuk melakukan perhitungan statistik dengan menggunakan komputer.

Penggunaan teknik pengumpulan angket, instrumen tersebut semisalnya diberikan kepada 37 pelanggan (masyarakat) yang sedang menerima pelayanan setelah dilakukan seperti dibawah ini:

Responden	Alternatif jawaban
18 orang menjawab	SS
12 orang menjawab	ST
4 orang menjawab	RG
2 orang menjawab	TS
1 orang menjawab	STS

Data tersebut dapat dianalisis dengan menghitung rata-rata jawaban berdasarkan skoring setiap jawaban dari responden. Berdasarkan skor yang telah ditetapkan dapat dihitung sebagai berikut :

Jumlah skor untuk 18 orang yang menjawab SS	=	18 x 5	=	90
Jumlah skor untuk 12 orang yang menjawab ST	=	12 x 4	=	48
Jumlah skor untuk 4 orang yang menjawab RG	=	4 x 3	=	12
Jumlah skor untuk 2 orang yang menjawab TS	=	2 x 2	=	4
Jumlah skor untuk 1 orang yang menjawab STS	=	1 x 1	=	1
Jumlah total			=	155

Berdasarkan tabel tanggapan, presentase tanggapan responden dan presentase skor tanggapan responden dapat dicari menggunakan rumus berikut ini:

Untuk persentase

$$\frac{\text{Frek. Masing-masing tanggapan responden x 100\%}}{\text{Jumlah keseluruhan Frek}}$$

Sedangkan untuk jumlah presentase skor menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah keseluruhan skor x 100\%}}{\text{(bobot tanggapan sangat setuju x jumlah responden)}}$$

Pada penelitian ini untuk menentukan jumlah skor ideal (kriterium) untuk seluruh item = 5 x 37 = 185 (Seandainya semua menjawab SS). Jumlah skor yang diperoleh dari penelitian = 155. Setelah pengolahan data diatas selesai dilakukan, maka teknik penganalisaan datanya sebagai berikut:

Skor ideal : skor tertinggi x ∑ item pertanyaan x ∑ responden

Skor aktual : jumlah skor yang diperoleh melalui pengumpulan data.

$$\frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\frac{155}{185} \text{ X } 100\%$$

= 83.78 %

(Sumber : Data yang diolah)

Tabel 1.3
Kriteria Presentase Skor Tanggapan Responden

No.	% Jumlah Skor	Kriteria
1	20.00% – 36.00%	Tidak Baik
2	36.01% – 52.00%	Kurang Baik
3	52.01% – 68.00%	Cukup
4	68.01% – 84.00%	Baik
5	84.01% – 100%	Sangat Baik

(Sumber: Narimawati, 2007:85)

Skor aktual adalah jawaban seluruh responden atas kuesioner yang telah diajukan. Skor ideal adalah skor atau bobot tertinggi atau semua responden diasumsikan memilih jawaban dengan skor tertinggi. Penjelasan bobot nilai skor aktual dapat dilihat pada tabel 1.3.

Metode kuantitatif adalah metode pengolahan data berbentuk angka. Metode kuantitatif dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Linear Sederhana. Pengertian regresi linear menurut Umi Narimawati yaitu “regresi linear membuat estimasi koefisien-koefisien persamaan linear, mencakup satu atau dua variabel bebas yang dapat digunakan secara tepat untuk memprediksi nilai variabel tergantung” (Narimawati, 2007:110). Pendapat tersebut menyatakan analisis

regresi linear sederhana adalah metode analisis statistik yang digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel implementasi kebijakan Sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan (X) terhadap variabel kualitas pelayanan sertifikasi tanah di Kota Bandung (Y). Persamaan regresi linear sederhana dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\hat{Y} = \alpha + \beta X$$

Keterangan :
α = konstanta (X=0)
β = koefesien regresi
X = nilai variabel independen
 = nilai variabel dependen
(Sugiyono, 2009:188)

Proses regresi linear sederhana, peneliti menggunakan alat bantuan yaitu *software SPSS* 13.0 *for windows* untuk mempermudah dalam perhitungan. Rancangan pengujian hipotesis digunakan untuk mengetahui korelasi dari kedua variabel yang diteliti, dalam hal ini adalah korelasi antara implementasi kebijakan Sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan dan kualitas pelayanan sertifikasi tanah di Kantor Pertanahan Kota Bandung dengan menggunakan pengujian statistik.

Menganalisis tinggi rendahnya korelasi antara variabel implementasi kebijakan Sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan dengan varaibel kualitas pelayanan sertifikasi tanah di Kantor Pertanahan di Kota Bandung menggunakan Koefisen Korelasi *Product – Moment (r Pearson).* Korelasi *Pearson* digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya hubungan *linier* antara variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) serta fokus pengukuran adalah besar kecilnya hubungan antara dua variabel yang dikorelasikan, dengan rumus sebagai berikut :

$$rxy = \frac{n\left(\sum XY\right) - \left(\sum X\right)\left(\sum Y\right)}{\sqrt{\left\{n\left(\sum X^2\right) - \left(\sum X\right)^2\right\}\left\{n\left(\sum Y^2\right) - \left(\sum Y\right)^2\right\}}}$$

Dimana :
r_{xy} = Koefisien korelasi r
X = Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
Y = Akuntabilitas Pendapatan Pajak Daerah
n = Banyaknya sampel
(Faisal, 1999:225)

Korelasi *Pearson* merupakan teknik pengukuran tingkat hubungan antara dua variabel yang datanya berskala interval dalam perhitungannya menggunakan *software SPSS* 13.0 *for Windows*. Proses dalam menganalisa besarnya hubungan antara kedua variabel dan menentukan berada pada kriteria mana dapat digunakan koefisien korelasi *Guilford* sebagai berikut :

Tabel 1.4
Interpretasi Tingkat Hubungan Korelasi Menurut *Guilford*

Kurang dari 0,20	Hubungan rendah sekali; lemas sekali
0,20 - 0,40	Hubungan rendah tetapi pasti
0,40 - 0,70	Hubungan yang cukup berarti
0,70 - 0,90	Hubungan yang tinggi; kuat
Lebih dari 0,90	Hubungan sangat tinggi; kuat sekali; dapat diandalkan

Sumber : *Guilfor*d dalam Rakhmat, 1999:29

Proses analisis determinasi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh perubahan variabel implementasi kebijakan Sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan terhadap kualitas pelayanan sertifikasi tanah di Kantor Pertanahan Kota Bandung. Perhitungan besar pengaruh antara dua variabel, dapat menggunaka rumus sebagai berikut :

$$KD = r^2 \times 100\%$$

Dimana :
$0 < r^2 < 1$
KD : koefisien determinasi
r : koefisien korelasi
Kd = 0 : pengaruh X terhadap Y lemah
Kd = 1 : pengaruh X terhadap Y kuat
(Narimawati, 2007:89)

Rancangan pengujian hipotesis digunakan untuk mengetahui korelasi dari kedua variabel yang diteliti, dalam hal ini adalah korelasi antara implementasi kebijakan Sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan terhadap kualitas pelayanan sertifikasi tanah di Kantor Pertanahan Kota Bandung dengan menggunakan pengujian statistik. Langkah dalam pengujian statistik yaitu menentukan hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Hipotesis penelitian yang diajukan adalah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara implementasi kebijakan Sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan dengan kualitas pelayanan sertifikasi tanah di Kantor Pertanahan Kota Bandung.

Berdasarkan pada alat statistik yang digunakan dan hipotesis penelitian diatas maka peneliti menetapkan dua hipotesis yang digunakan untuk uji statistiknya yaitu hipotesis nol (H_0) yang diformulasikan untuk ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) dengan perumusan hipotesis statistik sebagai berikut :

$H_{0:} \beta = 0$, (0 berarti tidak ada hubungan)
$H_{0:} \beta \neq 0$, ("tidak sama dengan nol" berarti lebih besar atau kurang (-) dari nol berati ada hubungan
β = nilai korelasi
(Sugiyono, 2009 : 104)

Pengujian signifikansi suatu Koefisien Korelasi, dapat menggunakan statistik uji t *student* dengan rumus sebagai berikut :

$$t_{hitung} = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan :
t : nilai uji t
r : koefisien *Korelasi*
n : jumlah sampel
(Sugiyono, 2008:184)

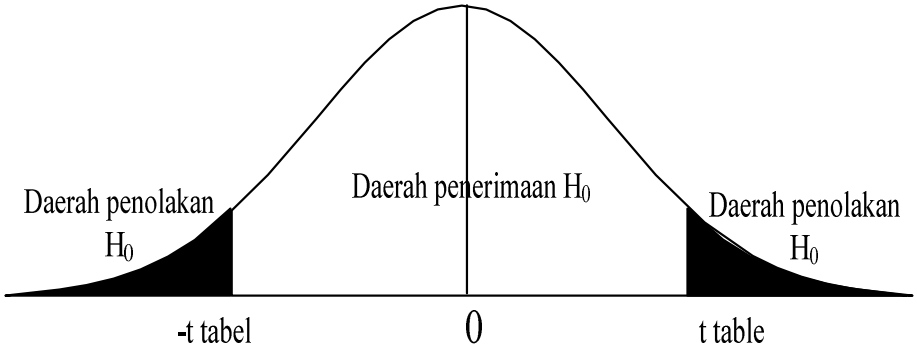
Hasil t_{hitung} tersebut selanjutnya dibandingkan dengan hasil $t_{tabel.}$ Jika menggunakan tingkat signifikansi (α = 0,05) untuk diuji dua pihak, maka kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis yaitu sebagai berikut:

- Jika $t_{hitung} \geq t_{table}$ maka H_0 ada di daerah penolakan, berarti Ha diterima artinya antara variabel X dan variabel Y ada pengaruhnya.
- Jika $t_{hitung} \leq t_{table}$ maka H_0 ada di daerah penerimaan, berarti Ha ditolak artinya antara variabel X dan variabel Y tidak ada pengaruhnya.

Mengetahui koefisien korelasi signifikan atau tidak signifikan ditentukan kreteria sebagai berikut :

- Jika nilai signifikan (probabilitas) < 0,05, hubungan kedua variabel signifikan, H_0 ditolak.
- Jika nilai signifikan (probabilitas) > 0,05, hubungan kedua variabel tidak signifikan, H_0 diterima.

Gambar 1.2
Uji Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesis



(Sugiyono,2009:258)

Tingkat signifikannya yaitu α = 0,05 dengan uji dua pihak dan derajat kebebasannya (dk = n-2), artinya jika hipotesis nol ditolak dengan taraf kepercayaan 95 %, maka kemungkinan bahwa hasil dari penarikan kesimpulan mempunyai kebenaran 95 % dan hal ini menunjukan adanya hubungan (korelasi) yang meyakinkan (signifikan) antara dua variabel tersebut.

1.7 Lokasi dan Jadwal Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kantor Pertanahan Kota Bandung Jl. Suekarno-hatta No.586 Telp : (022) 7562055. Adapun waktu penelitian dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Table 1.3
Lokasi dan Jadwal Penelitian

Waktu / Kegiatan	Tahun 2011						
	Jan	**Feb**	**Mar**	**Apr**	**Mei**	**Jun**	Jul
Penyusunan Rancangan Judul							
Penyusunan Usulan Penelitian							
Seminar Usulan Penelitian							
Pengumpulan Data							
Pengolahan Data							
Pembuatan Skripsi							
Sidang Ujian Skripsi							